



INOVASI SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

DR. AGUS JUSTIANTO

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Latar Belakang

Ratifikasi Kesepakatan Paris
(UU 16 Tahun 2016)

- Energi fosil berkontribusi dalam pembangunan ekonomi konsisional. Energi fosil menyumbang emisi GRK yang signifikan
- Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% atas kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030
- FAO (2016) menyatakan bahwa produksi bioenergi dari hutan merupakan salah satu opsi pencegahan perubahan iklim

Ketahanan energi

- Semakin terbatasnya pasokan energi fosil
- Impor minyak mentah Indonesia yang semakin meningkat
- Beban negara untuk pembangunan ekonomi semakin meningkat

Pengembangan inovasi pengembangan energi baru terbarukan sektor kehutanan

- Pengembangan teknologi untuk EBETK
 - Bioetanol, biodiesel, gas dan energi alternatif lainnya belum mampu mensubstitusi energi fosil
- Pemberian insentif kepada investor
- Mobilisasi sumber pendanaan

Peluang pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) #1

- ▶ PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menargetkan penggunaan Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan pada tahun 2050 paling sedikit sebesar 31%
- ▶ Bioenergi dapat dihasilkan dari hutan dengan jumlah penebangan pohon minimum atau tanpa menebang
 - ▶ menggunakan limbah organik seperti biji atau serasah sebagai sumber biomasa;
 - ▶ Seperti biji pohon nyamplung (*Calophyllum inophyllum*) , berpotensi memproduksi bioenergi tanpa menimbulkan deforestasi

Peluang pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) #2

- ▶ Salah satu program prioritas pemerintah adalah peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan untuk mewujudkan kedaulatan energi
- ▶ KLHK mendukung program prioritas ini melalui pengkajian kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biomassa, seperti Eucalyptus, Sengon, Nyamplung, Akasia, Kaliandra, dan kemiri
- ▶ Pembangunan HTE berperan dalam mitigasi perubahan iklim:
 - ▶ Penyerapan karbon dalam bentuk hutan tanaman
 - ▶ Substitusi energi fosil sehingga jumlah emisi GRK yang dihasilkan lebih kecil

Karakteristik Pohon Potensial sebagai Energi Kayu

No	Nama Lokal	Pertumbuhan m3/ha/th	Kepadatan	Nilai Pembakaran (cal/g)	Produksi energi (GJ/ha/th)	Sifat energi kayu
1	Akor	17,0	0,77	4907	235,6	Baik
2	Pilang	20,5	0,70	5218	258,3	Baik
3	Weru	25,0	0,67	4870	301,5	Baik
4	Kaliandra	32,0	0,67	4152-4617	385,9	Baik
5	Sengon	30,0	0,44	4464	237,6	Tidak baik
6	Gamal	23-40 <i>(umur 3 -4thn)</i>	0,5-0,6	4548	326,7	Baik
7	Turi	16-65 t	0.46		124,2	Baik
8	Lamtoro gung	21	0,82	4464	310,0	Baik

1 M3 = 12,5 Giga Joule (GJ)

Sumber : Gutteridge and. Shelton, 1998; Simon and Stewart, 1998;
Bustomi, Effendi, et.al, 2010..

Biodiesel dari Nyamplung

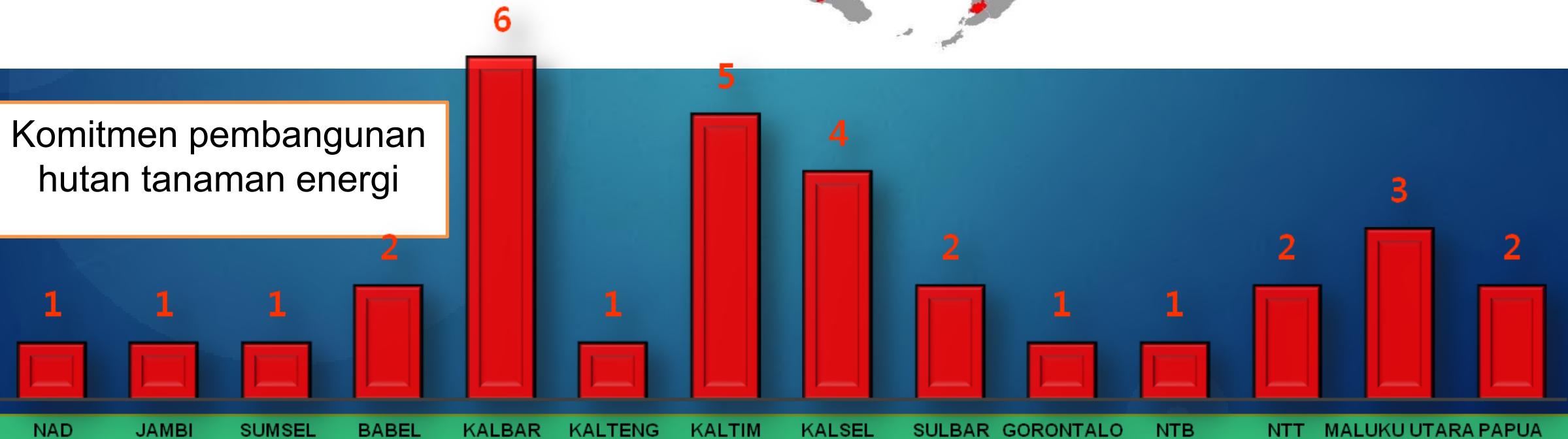
- Area Nyamplung yang tersedia = 480,000 ha
 - Total produksi Nyamplung 10,000kg/ha = 4,800 juta kg.
 - Total biodiesel dari Nyamplung = 2,100 juta L (hasil 0.43%)
-
- ***Jika permintaan nasional terhadap biodiesel sebesar 9,2 juta K.litre***
 - ***Biodiesel dari nyamplung = 22,8% dari permintaan nasional***
-
- ***Oleh karena itu, Indonesia butuh 2.5 juta ha area Nyamplung area untuk memenuhi permintaan nasional terhadap biodiesel.***



Peta Distribusi Hutan Tanaman Energi



Komitmen pembangunan
hutan tanaman energi



Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Tanaman Energi

± 9,10 M Ha

**2,8 m Ha
memiliki lisensi**

**7,2 m Ha
Belum memiliki
lisensi**

**1 M Ha
Kawasan hutan**

**1,09 M Ha
Kawasan hutan
(5 M ha th 2020)**

**240.000 Ha
Hutan masyarakat**

**1.739 Ha
Lahan dalam FMU**

**1,6 M Ha
Konsesi hutan**

**6,17 M Ha
Hutan masyarakat**

Peran BLI

- ▶ Pemanfaatan bioenergi sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga dan industri
 - ▶ Bioenergi dapat digunakan dalam bentuk biodiesel, bioethanol, dan wood pellet
 - ▶ Kerjasama pengembangan bioenergi telah dibangun dengan pelaku usaha kehutanan, antara lain dalam bentuk penanaman tanaman energi seluas 89.860 Ha oleh 10 Hutan Tanaman Industri (HTI), dan 23 HTI lainnya akan menanam seluas 87.600 Ha.
- ▶ BLI telah mengembangkan bioethanol dari nira aren yang diadopsi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Boalemo di Gorontalo dan sudah diaplikasikan di Desa Mandiri Berbasis Aren di Boalemo, sekaligus sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian desa
- ▶ Pengolahan aren menjadi bioethanol lebih menguntungkan dibandingkan mengolahnya menjadi bahan pangan gula aren:
 - ▶ Satu liter bioethanol mix memiliki kinerja yang setara dengan gas 3 kg seharga Rp. 20.000,-
- ▶ Pengembangan biodiesel dari nyamplung:
 - ▶ Luas tanaman nyamplung: 480 ribu hektar
 - ▶ Total produksi biji nyamplung: 4,8 juta ton (asumsi produktivitas 10 ton/ha)
 - ▶ Produksi biodiesel : 2,1 juta liter biodiesel (asumsi rendemen 43%)

Tantangan

- ▶ Pengembangan bioenergi sektor kehutanan masih terkendala dengan teknologi yang terbatas yang berimplikasi pada harga energi yang dihasilkan mempunyai daya saing rendah dibandingkan dengan energi fosil.
- ▶ Konflik lahan hutan
- ▶ Kesesuaian dengan lokasi jaringan energi → saat ini, pengembangan kawasan hutan energi belum dikaitkan dengan jaringan Perusahaan Listrik Negara
- ▶ Penyesuaian harga listrik yang akan dikeluarkan oleh pengusaha perkebunan hutan energi, yang ditetapkan oleh PLN masih rendah (1300 hingga 1500)
- ▶ Komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan

Potensi pengurangan emisi GRK dari Bioenergi

- ▶ Jika program pencampuran bahan bakar nabati
 - ▶ sebanyak 10% (B10) diimplementasikan → pengurangan emisi GRK hingga 5,1 juta ton setara karbon.
 - ▶ Sebanyak 20% (B20) pengurangan emisi GRK mencapai 9,4 juta ton setara karbon.

Opsi Insentif Bagi Aksi Mitigasi PI Untuk Energi Berbasis Hutan

- ▶ Insentif Pemerintah berupa pengurangan pajak untuk meningkatkan investasi (pajak alat berat, PPN, dll)
- ▶ Dukungan pendanaan/investasi baik dari perbankan maupun dari BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup → Membuka akses pada BLU Lingkungan
- ▶ Penetapan prosentase kewajiban penggunaan bioenergi sebagai substitusi BBM khususnya untuk perusahaan pengemiter tinggi (untuk menciptakan kepastian demand)
- ▶ Pemerintah menyediakan subsidi harga sebagai insentif kepada pengelola Hutan Tanaman yang memanfaatkan kayu limbah
- ▶ Kemudahan dalam menjual produk energi yang dihasilkan

Terima Kasih



Source: Stokes 2008



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

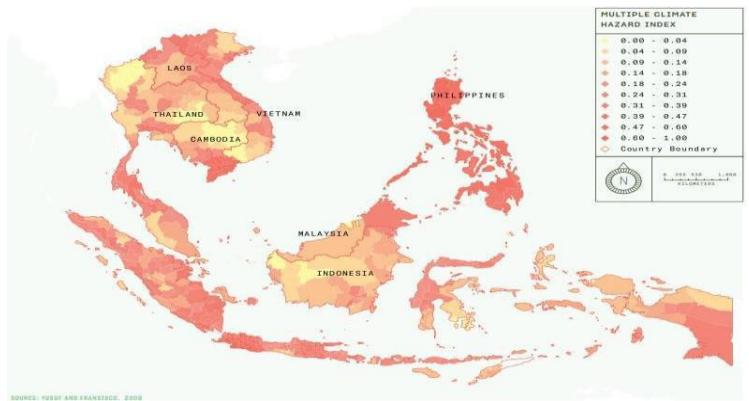
Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI

Jakarta, 29 Agustus 2018



Indonesia berkomitmen mengatasi perubahan iklim global



“Sebagai negara yang terletak di cincin api (ring of fire), Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim”

Dampak Perubahan Iklim Global

Flood



Banjir di Jakarta tahun 2014 menyebabkan 17,4% wilayah Jakarta terendam, dengan korban 23 orang meninggal dan 65 ribu orang devakuasi.

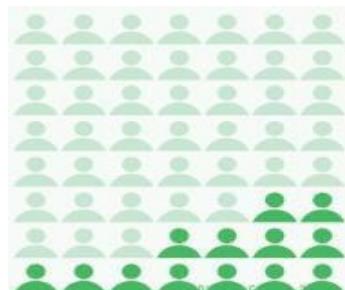
(ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE, 2016)

Drought



Lebih dari 3,9 juta orang di 105 wilayah Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan di tahun 2017.

(BNPB, 2017)



Penduduk miskin yang paling rentan terkena dampaknya:
11.3% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

(GFDRR, 2018)

Proyeksi
peningkatan suhu/
temperatur di
Indonesia

2020 - 2050

+1°C

2070 - 2100

+2-3°C



**Dampak ke sektor
kesehatan :**

3-5% peningkatan penyakit menular dan penyebarannya

**Dampak ke
sektor pertanian:**

Padi : -4,6%

Jagung : -20%

Kedelai : -65.2%

Gula: -17.1%

Minyak Sawit: -21.4%

Komitmen Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim



Mitigation

(RAN - GRK :
Rencana Aksi
Nasional – Gas
Rumah Kaca)

Adaptation

(RAN - API:
Rencana Aksi
Nasional –
Adaptasi
Perubahan
Iklim)

Biodiversity

(IBSAP: Indonesia
Biodiversity
Strategy and
Action Plan 2003
– 2020)

Policy Instrument 1

UU No. 16/2016

Ratifikasi Paris
Agreement to
the United
Nations
Framework
Convention on
Climate
Change
(UNFCCC)

Policy Instrument 2

Indonesia's
Voluntary
National
Determined
Contribution
(NDC) to Paris
Agreement, by
2030:

29%

Unconditional
emission
reduction
against
business as
usual scenario

Policy Instrument 3

Up to 41%

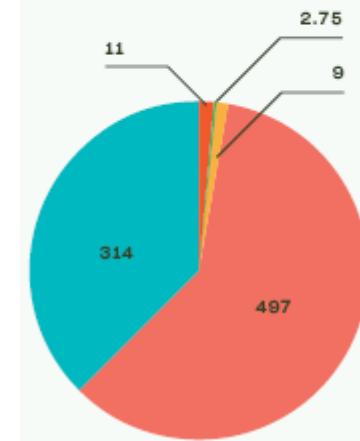
Conditional
emission
reduction
subject to
against
international
scenario

Proyeksi Business As Usual
(BAU) pengurangan emisi tiap
sektor tahun 2030 (dalam
Mton on CO2e)



Projected Business as Usual
(BAU) emission reduction from
each sector category by 2030
(in **Mton on CO2e**)

- ◆ Energy (including fugitive)
- ◆ Waste
- ◆ IPPU
- ◆ Agriculture
- ◆ Forestry (including peat fire)



Alokasi Anggaran untuk Mitigasi Perubahan Iklim (Budget Tagging)



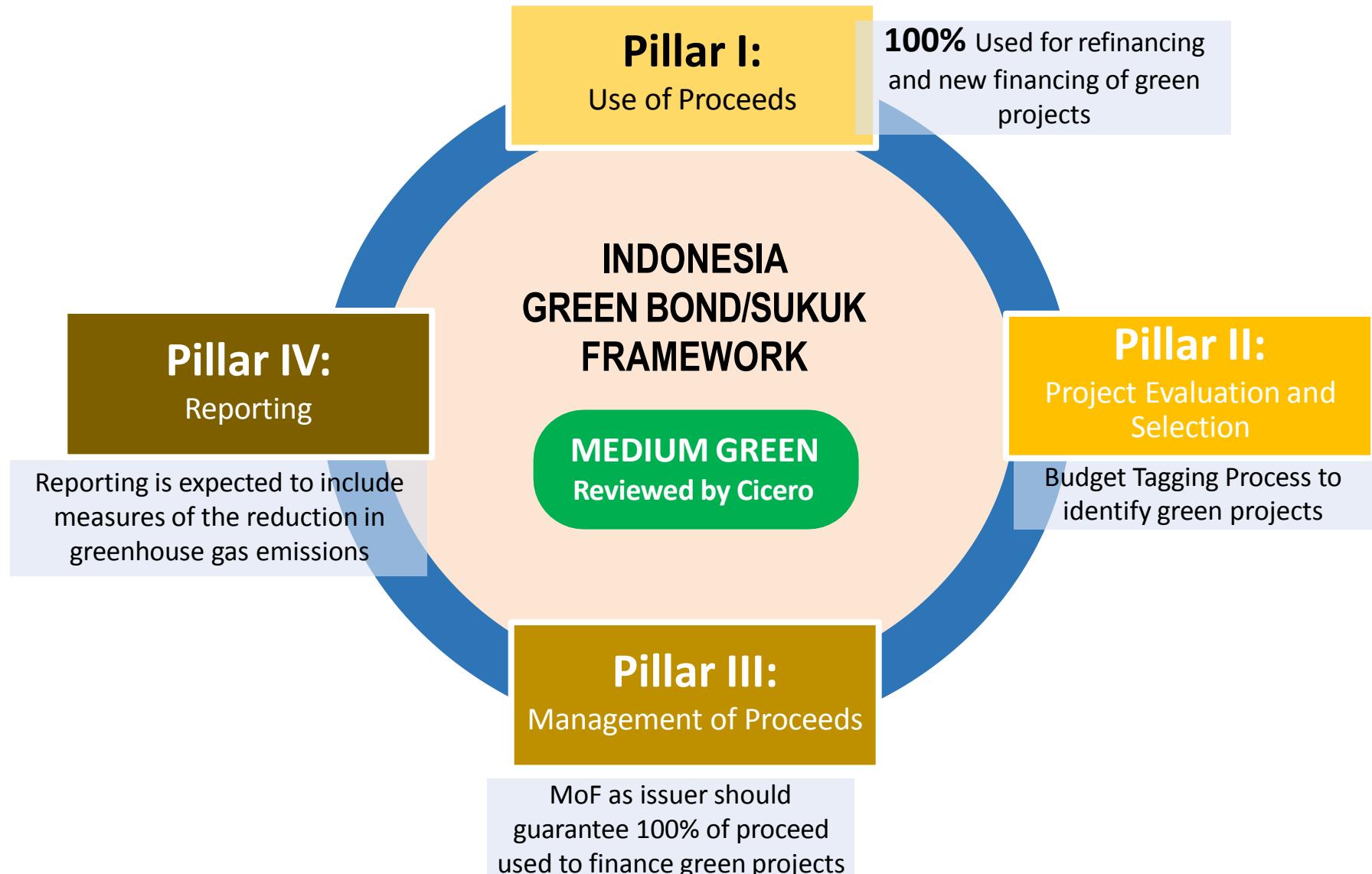
Tahun	Nilai Pagu	Nilai Realisasi
2016	72.351.731.860.040,00	48.993.824.671.295,00
2017	81.794.467.158.000,00	N/A
2018	116.151.234.780.000,00	N/A

Green Bond & Green Sukuk Framework

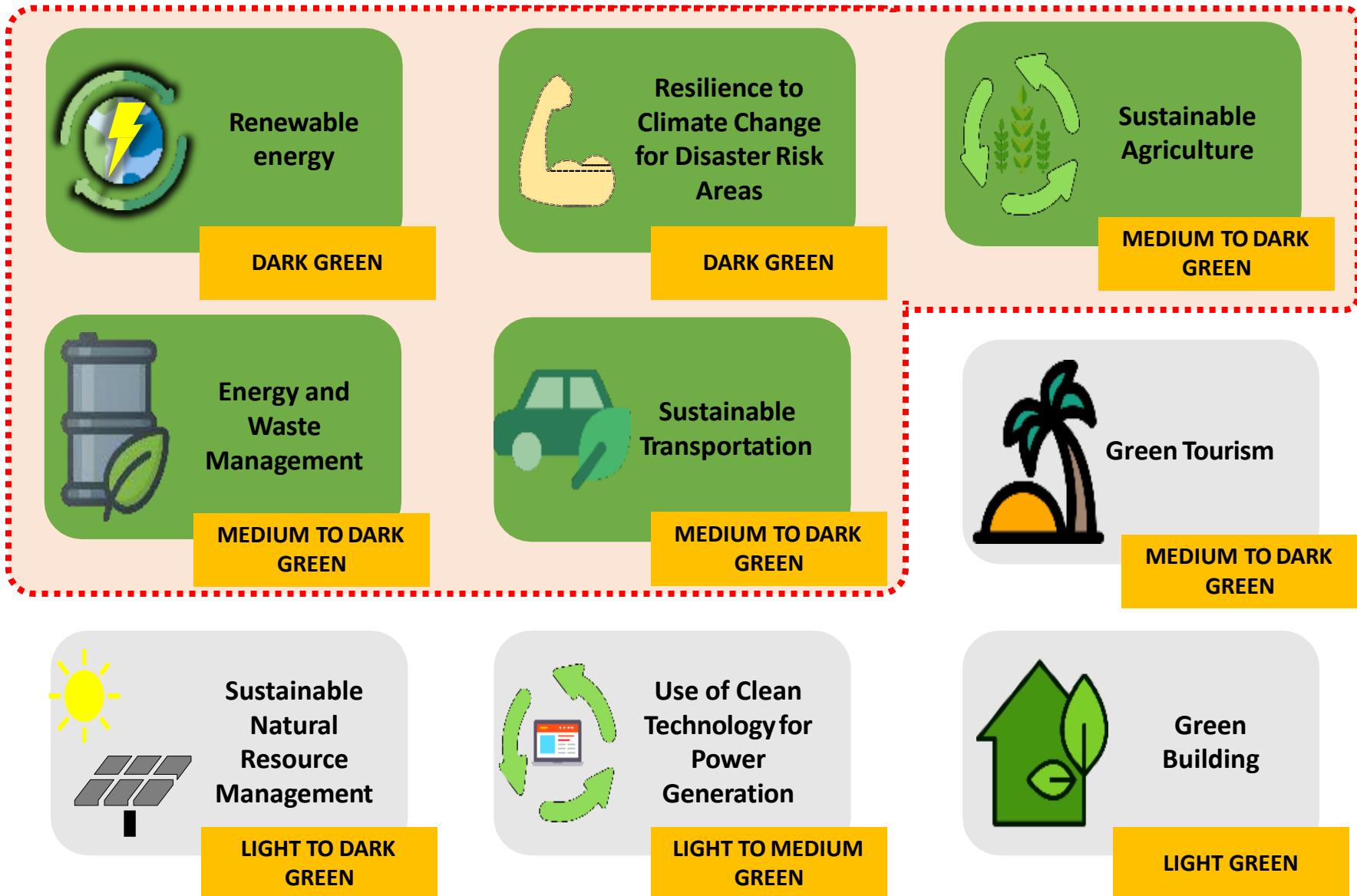
<http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2058>

*Indonesia Green Bond & Green Sukuk Framework merupakan kerangka
kerja penerbitan Surat Utang Negara dan/atau Sukuk Negara untuk
membiayai proyek-proyek ramah lingkungan*

Indonesia Green Bond & Green Sukuk Framework



9 Sektor Green yang Dapat Dibiayai



Sukuk Negara untuk Pembiayaan Proyek

SBSN sebagai Instrumen Pembiayaan APBN

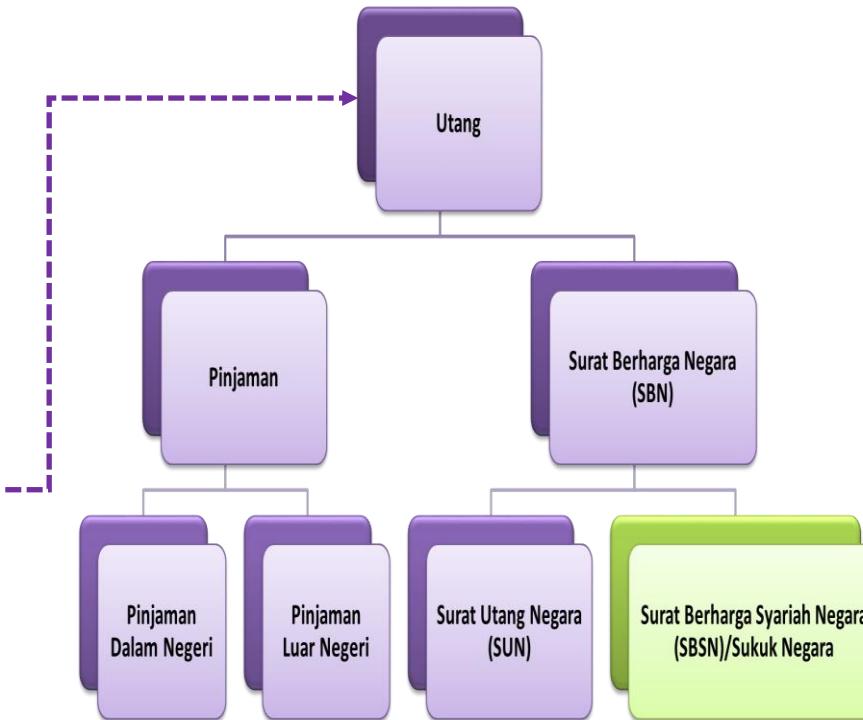
Postur APBN 2018

(triliun Rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA	1.894,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,1
2. PNBP	275,4
II. Penerimaan Hibah	1,2
B. BELANJA NEGARA	2.220,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,5
1. Belanja K/L	847,4
2. Belanja Non K/L	607,1
* a.l. Pembayaran Bunga Utang	238,6
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	766,2
1. Transfer Ke Daerah	706,2
2. Dana Desa	60,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(87,3)
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(325,9)
** % Surplus/(Defisit) terhadap PDB	(2,19%)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,9
I. Pembiayaan Utang	399,2
*** a.l. SBN (neto)	414,5
II. Pembiayaan Investasi	(65,7)
III. Pemberian Pinjaman	(6,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,1)
V. Pembiayaan Lainnya	0,2

“SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek.”

(Pasal 4, UU No.19/2008 tentang SBSN)



Kontribusi SBSN Dalam Pembiayaan APBN



Rp927,97
Triliun



**Akumulasi
penerbitan SBSN s.d.
28 Agustus 2018**

- Porsi penerbitan SBSN terhadap SBN bruto terus meningkat (2014 = 19% ; 2015 = 24% ; 2016 = 28% ; 2017 = 29%)
- Denominasi: IDR dan USD
- Outstanding SBSN per 28 Agustus 2018 **Rp635,81 Triliun**
- Porsi SBSN terhadap total outstanding SBN ± 18%



Rp 62,47
Triliun



**Akumulasi Project
Financing Sukuk 2013 -
2018**

Rel, Stasiun, Persinyalan & Fasilitas KA Lainnya di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi
Rp24,62 Triliun



Jalan dan jembatan di seluruh Indonesia
Rp22,96 Triliun



Bendungan, Embung, Pengendali banjir, Drainase, Penyediaan air baku, Pengaman pantai di seluruh Indonesia
Rp8,01 Triliun



Sarana dan prasarana pendidikan (gedung kuliah/ruang belajar, laboratorium, perpustakaan) di seluruh Indonesia
Rp4,05 Triliun



Sarana dan prasarana pelayanan umum (Asrama Haji, KUA, Taman Nasional, Laboratorium) di seluruh Indonesia
Rp2,83 Triliun

Achievements Sukuk Negara dalam Satu Dekade



Rp 925,2 Triliun

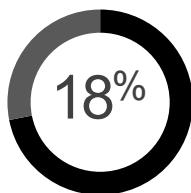
Total akumulasi
penerbitan SBSN
2008 - 24 Agustus 2018

Rp 634,26 Triliun

Outstanding SBSN per
tanggal 24 Agustus 2018

Rp 62,4 Triliun

Total penerbitan *Project
Financing Sukuk*
2013 - 2018



Porsi SBSN terhadap total
outstanding SBN



- Penerbit *Sovereign Green Sukuk* pertama di dunia
- Negara penerbit international *Sovereign Sukuk* (USD denominated) terbesar di dunia



7 jenis instrumen SBSN,
ditujukan untuk investor institusi
dan individu, di pasar domestik
dan internasional



Telah dikembangkan 4 jenis struktur
akad SBSN:
Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Al
Khadamat, SBSN Ijarah Asset to be
Leased, SBSN Wakalah

Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Proyek



Total Alokasi Sukuk Proyek (2013-2018): Rp62,47 Triliun



Pembangunan **Jalan dan Jembatan di 30 Provinsi**



Pembangunan
Jalur Kereta Api di
Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi
& modernisasi Stasiun Manggarai



Pembangunan
328 Sumber Daya Air
(bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)



Pengembangan & Revitalisasi
Asrama Haji
di 24 Kota/Kabupaten



Pembangunan & Rehabilitasi
701 Kantor Urusan Agama & Manasik Haji



Pembangunan & Pengembangan
Gedung Perkuliahinan di 54 Perguruan Tinggi



Pembangunan & Pengembangan
32 Madrasah



Pembangunan
3 Taman Nasional
(Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera)



Pembangunan & Pengembangan
3 Laboratorium



Ketetapan DSN MUI
Nomor 01/DSN-MUI/III/2012

Kriteria Proyek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah :

- A. Proyek memiliki kejelasan perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian, sekurangnya meliputi aspek:
 - ✓ Rencana pemanfaatan.
 - ✓ Rencana pembangunan proyek dari segi manfaat – mudharat (analisis mashlahat proyek).
- B. Pemanfaatan Proyek bukan untuk tujuan yang berkaitan dengan:
 1. Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap jasa keuangan konvensional (ribawi).
 2. Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang mengandung unsur perjudian (maysir).
 3. Penyelenggaraan dan/atau adanya kontribusi terhadap produksi, distribusi, perdagangan dan/atau penyediaan barang/jasa yang dilarang (haram).
 4. Penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang bersifat merusak/berbahaya (mudharat) terhadap akhlak moral maupun lingkungan.

Perbandingan Mekanisme Project Underlying vs Project Financing

Yang dimaksud dengan **“membayai pembangunan proyek”** adalah membayai pembangunan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN, termasuk proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

(Penjelasan Pasal 4,
UU Nomor 19/2008)

<i>Project Underlying</i>	<i>Project Financing</i>
Obyek pembiayaan berupa proyek/ kegiatan (Belanja Modal untuk pembangunan fisik, Rupiah Murni) dalam APBN tahun berjalan.	Obyek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di earmarked dengan SBSN.
Obyek pembiayaan ditetapkan Menteri Keuangan setelah UU APBN disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit.	Obyek pembiayaan ditetapkan bersama-sama Pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU APBN, karena besarannya dapat mempengaruhi besaran defisit APBN.
Sifat pembiayaannya masih tetap Rupiah Murni (RM) dan terbatas hanya Belanja Modal.	Sifat pembiayaannya bukan Rupiah Murni melainkan SBSN-PBS dan tidak terbatas pada Belanja Modal.
Tidak ada perubahan dalam sistem penganggaran.	Ada penyesuaian dalam mekanisme penganggaran.
Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Mekanisme pembiayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Indonesia Global Green Sukuk

The World's First Sovereign Green Sukuk

Kenapa Green Sukuk?



EASE OF ISSUANCE

Simple characteristic of Sukuk to be used as underlying assets

Familiarity in preparing and due diligence of projects since 2014

Familiarity in the issuance process (similar to regular sukuk)



REPUTATION

A lot of attention and recognition

Positive press coverage



INNOVATION

Demonstrating innovation of financing instruments

Promoting sustainable financing using broader initiatives



PROFILE

Leveraging private sector's capital to finance sustainable investment

Improving Green Bond's market profile - marketing opportunity for issuers

INVESTOR DIVERSIFICATION & MARKET ACCESS

Taping **29%** new (green) investors

INDONESIA GLOBAL GREEN SUKUK

One of the remarkable achievement



Financing or refinancing eligible Green Project (Supports Carbon Emission Reduction)



Selected Press Coverage

IFR MARKETS

"The Republic of Indonesia issued the first Green sovereign bond from Asia on Thursday, driving awareness of environmentally-conscious investments in a region that has lagged the rest of the world."

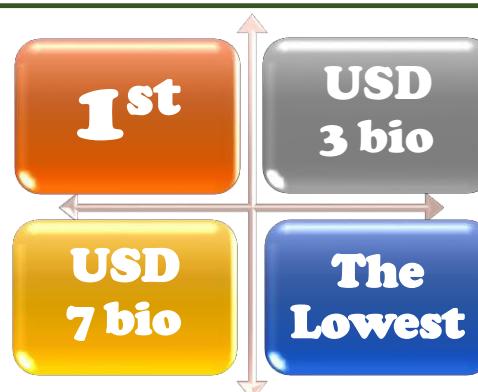
GlobalCapitalAsia

"Now that Indonesia has blown open the green market for sovereigns in Asia, market watchers are optimistic that others will follow. Within the region, sources say Hong Kong is the most likely to sell a green bond."

Achievements of the Transaction – USD1.25b 5 year Green Sukuk / 1 March 2018

USD Green Sukuk issued by sovereign entity

Final order-book altogether with regular Global Sukuk



The largest bid of Global Sukuk issuance from a non-GCC sovereign entity

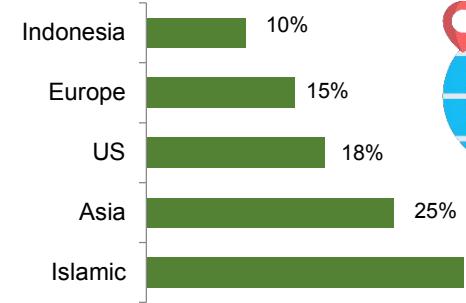
Record of spread to US Treasury among Sukuk offers by the Republic of Indonesia

Record of a yield difference of 5 Y and 10Y at 65 bps among Sukuk offers the RoI

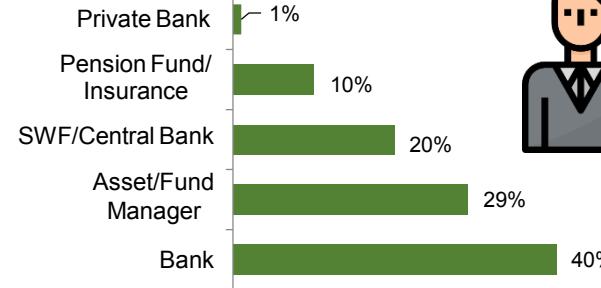
Distribusi Investor Green Sukuk



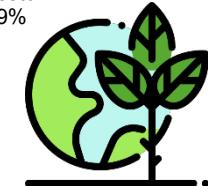
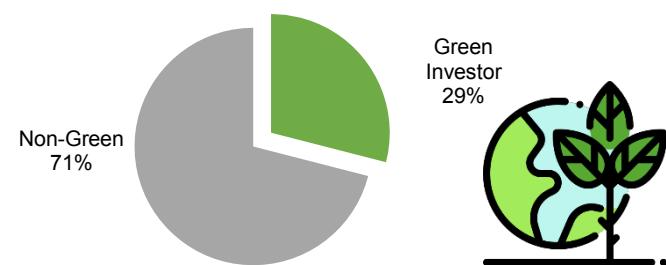
Distribusi berdasarkan wilayah



Distribusi berdasarkan tipe investor



Distribusi green investor



Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Green Sukuk



Penerbitan Green Global Sukuk sebesar USD1,25 miliar digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN tahun anggaran 2018 (*financing* sebesar Rp8,207 Triliun) dan 2016 (*refinancing* sebesar Rp8,547 Triliun) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Green Bond/Sukuk Framework.

Proyek-proyek Green tersebut tersebar di 4 K/L, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rp)		Total Nilai Proyek
		Tahun 2018	Tahun 2016	
1	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.244.253.113.400	1.442.361.056.874	8.686.614.170.274
2	Kementerian Perhubungan	962.832.354.300	7.002.478.802.535	7.965.311.156.835
3	Kementerian Pertanian	441.000.000	-	441.000.000
	Kementerian Energi			
4	dan Sumber Daya Mineral	-	102.953.668.111	102.953.668.111
Total		8.207.526.467.700	8.547.793.527.520	16.755.319.995.220

Green Project Berdasarkan Sektor



Proyek-proyek Green dalam penerbitan *Green Sukuk* tersebut tersebar di 5 sektor, dengan rincian sebagai berikut

No	Eligible Green Sector	Kategori Green Berdasar Opini CiCERO	Tahun 2018		Tahun 2016		Total Nilai Proyek (Rp)	Total Jumlah Proyek
			Nilai Proyek (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Proyek (Rp)	Jumlah Proyek		
1	Renewable Energy	Dark Green	-	-	102.953.668.111	5	102.953.668.111	5
2	Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas and Sectors/Disaster Risk Reduction	Dark Green	7.125.543.101.700	191	64.698.469.028	50	7.190.241.570.728	241
3	Sustainable Transport	Medium to Dark Green	962.832.354.300	18	7.002.478.802.535	39	7.965.311.156.835	57
4	Waste to Energy and Waste Management	Medium to Dark Green	-	-	1.377.662.587.846	26	1.377.662.587.846	26
5	Sustainable Agriculture	Medium to Dark Green	119.151.011.700	8	-	-	119.151.011.700	8
Total			8.207.526.467.700	217	8.547.793.527.520	120	16.755.319.995.220	337

Sukuk Negara Awards



Sukuk Negara memperoleh penghargaan pertama kali pada tahun 2009 untuk seri IFR 001 dan IFR 002 dari Alpha Southeast Asia

First Award



*Penghargaan Sukuk yang berhasil diraih sejak tahun 2009 s.d. 2017 sebanyak **27 penghargaan***

Islamic Finance News

Sejak tahun 2010 s.d. 2017 Sukuk Negara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Islamic Finance News (kecuali pada tahun 2013) dengan total penghargaan sebanyak 7 Award. Hal tersebut menjadikan Islamic Finance News sebagai institusi yang paling banyak memberikan award kepada Sukuk Negara

Sukuk Negara memperoleh penghargaan *“**Sustainable and Responsible Capital Markets Award**” dari Global Capital Euro Money Institutional Investor ILC atas penerbitan Green Sukuk untuk pertama kalinya pada tahun 2018

*Award belum dapat dipublish



Incoming Award

Tahun	Award
2009	- Deal of The Year in Southeast Asia (Alpha Southeast Asia) - Country Deals of The Year (Asiamoney) - Islamic Deal of the Year (IFR Asia) - Indonesia Best Deal 2009 (The Asset Triple A Awards) - Best Sovereign Sukuk 2009 (The Asset Triple A Awards) - Best Islamic Deal of The year 2009 (The Asset Triple A Awards)
2010	- Best Islamic Financing (Finance Asia) - Islamic Finance Deal of the Year (Credit Magazine) - Deal of the Year (Islamic Finance News) - Sovereign Deal of the Year (Islamic Finance News) - Indonesia Deal of the Year (Islamic Finance News) - Best Sovereign Bond Deal in Southeast Asia (Alpha Southeast Asia)
2011	- Indonesia Deal of the Year (Islamic Finance News) - Indonesia Best Islamic Deal (The Asset Triple A Awards) - Best Sukuk Deal (Euromoney Islamic Finance Awards)
2012	- Indonesia Deal of The Year (Islamic Finance News) - Highly Commended Islamic Deal Indonesia (The Asset) - Highly Commended Sovereign Sukuk (The Asset) - Best Islamic Deal of The Year (IFR Asia) - Best Sovereign Bond (Alpha Southeast Asia)
2013	- Islamic Deal of the Year – Best Sovereign Sukuk (The Asset Triple A) - Best Islamic Deal (The Asset Triple A)
2014	- Indonesia Deal of The Year (Islamic Finance News) - Best Sovereign Bond (Alpha Southeast Asia)
2015	- Indonesia deal of The Year (Islamic Finance News)
2016	- Sukuk Deal of The Year 2016 (Global Islamic Finance Awards)
2017	- IFN Indonesia Deal of the Year (Islamic Finance News) - IFN Indonesia Deal of The Year(Islamic Finance News)



Terima Kasih

Direktorat Pembiayaan Syariah

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan RI

Gedung Frans Seda Lantai 5
JI. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp: (62-21) 3516296

Website: www.djppr.kemenkeu.go.id
Email: sukuknegara@kemenkeu.go.id



PARTNERSHIP FOR
MARKET READINESS



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP – PMR Project

Developing the Profile of Greenhouse Gas Emissions
from the Indonesia's Power and Industry Sectors

MODEL PERHITUNGAN MACC DAN UPAYA MITIGASI INDONESIA: PEMBANGKIT & 8 INDUSTRI LAHAP ENERGI

Jakarta, 29 Agustus 2018

Artissa Panjaitan, MACC Economy Expert for PMR Project

DASAR “MARGINAL ABATEMENT COST CURVE” (MACC)

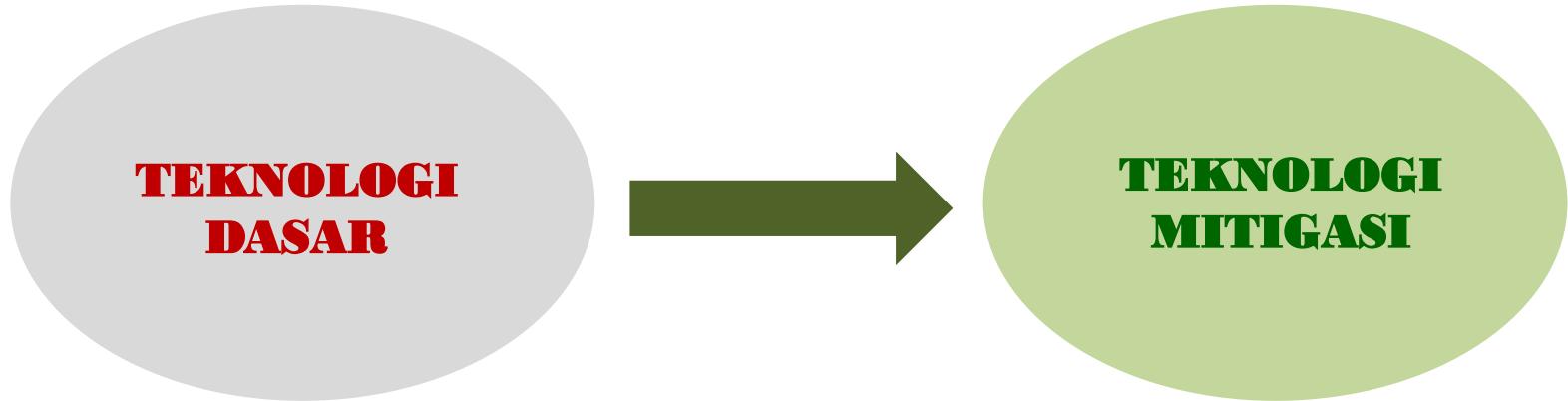


Upaya Mitigasi Untuk Mengendalikan Perubahan Suhu Permukaan Bumi $\leq 2^{\circ}\text{C}$



KURANGI EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

UBAH/PERBAIKI TEKNOLOGI SUMBER EMISI GRK



Perbandingan Teknologi Upaya Mitigasi

- Perkiraan Pengurangan Emisi
- Perkiraan Selisih Biaya Untuk Pengurangan Emisi

MODEL PERHITUNGAN MACC

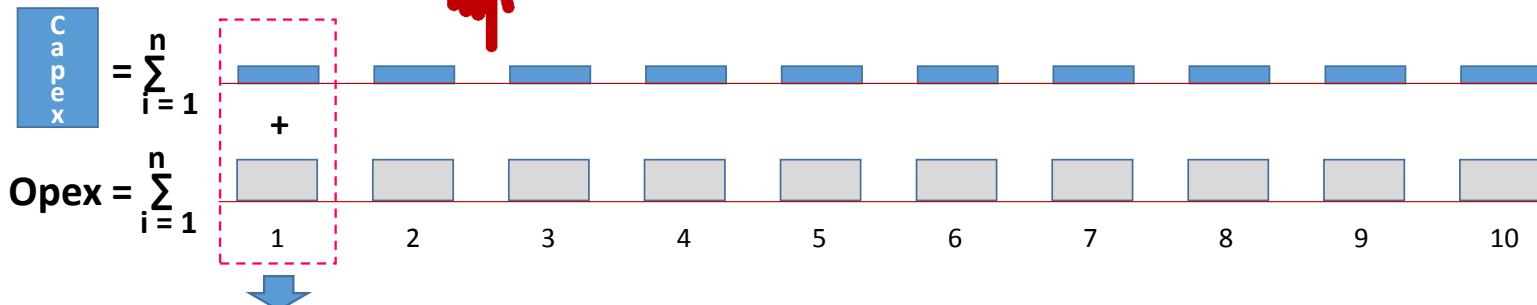
DASAR PEMIKIRAN:

- TEKNOLOGI DASAR berdasarkan teknologi pada tahun 2010
- Tingkat emisi TEKNOLOGI DASAR [4] lebih tinggi daripada TEKNOLOGI MITIGASI [2].
- Jika biaya TEKNOLOGI MITIGASI [1] lebih rendah dibandingkan TEKNOLOGI DASAR [3], mitigasi mengurangi emisi SEKALIGUS mengurangi biaya Belanja Modal dan Operasi.
- Batasan biaya mitigasi € 60/tCO₂e diambil dari dokumen laporan DNPI



$$\text{Abatement Cost} = \frac{(\text{Cost of CO}_2\text{e Mitigation Alternative [1]} - \text{Cost of CO}_2\text{e Baseline/Reference Model [3]})}{(\text{CO}_2\text{e Emission from Baseline Model [4]} - \text{CO}_2\text{e Emission from Mitigation Alternative [2]})} \leq € 60/\text{ton CO}_2\text{e}$$

$$[1] \text{ dan } [3] = \sum_{i=1}^n (\text{Capex}_i + \text{Opex}_i) / (1 + \text{biaya pendanaan})^i \quad \text{di mana: } n = \text{masa pakai teknologi}$$



Biaya pada tahun pertama dijadikan biaya TEKNOLOGI DASAR atau TEKNOLOGI MITIGASI

“PMR” MEMPERHATIKAN UPAYA MITIGASI DI SUB-SEKTOR PEMBANGKIT DAN 8 SUB-SEKTOR INDUSTRI UNTUK MEMENUHI “NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION” (NDC)



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

Empowered lives.
Resilient nations.

No.	Sector	GHG Emission Level 2010	GHG Emission Level 2030 (MtonCO ₂ e)			GHG Emission Reduction				Annual Average Growth BAU (2010 - 2030)	Average Growth 2000 - 2012
			MTon CO ₂ e	BAU	CM1	CM2	CM1	CM2	(MtonCO ₂ e)	% of Total BAU	
1	Energy	453.2	1,669	1,355	1,271	314	398	11%	14%	6.7%	4.50%
2	Waste	88	296	285	270	11	26	0.38%	1%	6.3%	4.00%
3	IPPU	36	69.6	66.85	66.35	2.75	3.25	0.10%	0.11%	3.4%	0.10%
4	Agriculture	110	119.66	110.39	115.86	9	4	0.32%	0.13%	0.4%	1.30%
5	Forestry	647	714	217	64	497	650	17.2%	23%	0.5%	2.70%
		1334	2869	2034	1787	834	1081	29%	38%	3.9%	3.20%

- Perhitungan MACC Sub-Sektor Pembangkit dan perkiraan total mitigasi berdasarkan RUPTL 2018 – 2027 yang diproyeksikan dengan pertumbuhan rata-rata ke tahun 2030 dan mengikuti syarat NDC di sektor Energi.
- Perhitungan MACC 8 Sub-Sektor Industri dan perkiraan mitigasi berdasarkan usulan dari pelaku industri dan masing-masing “expert PMR” yang meliput setiap sub-sektor

SEMESTA EMISI SUB-SEKTOR PEMBANGKIT



PPU dan
Kawasan
Mandiri

Daerah
belum
berlistrik

MITIGASI SUB- SEKTOR PEMBANGKIT

Dengan RUPTL 2018 – 2027 dan NDC:

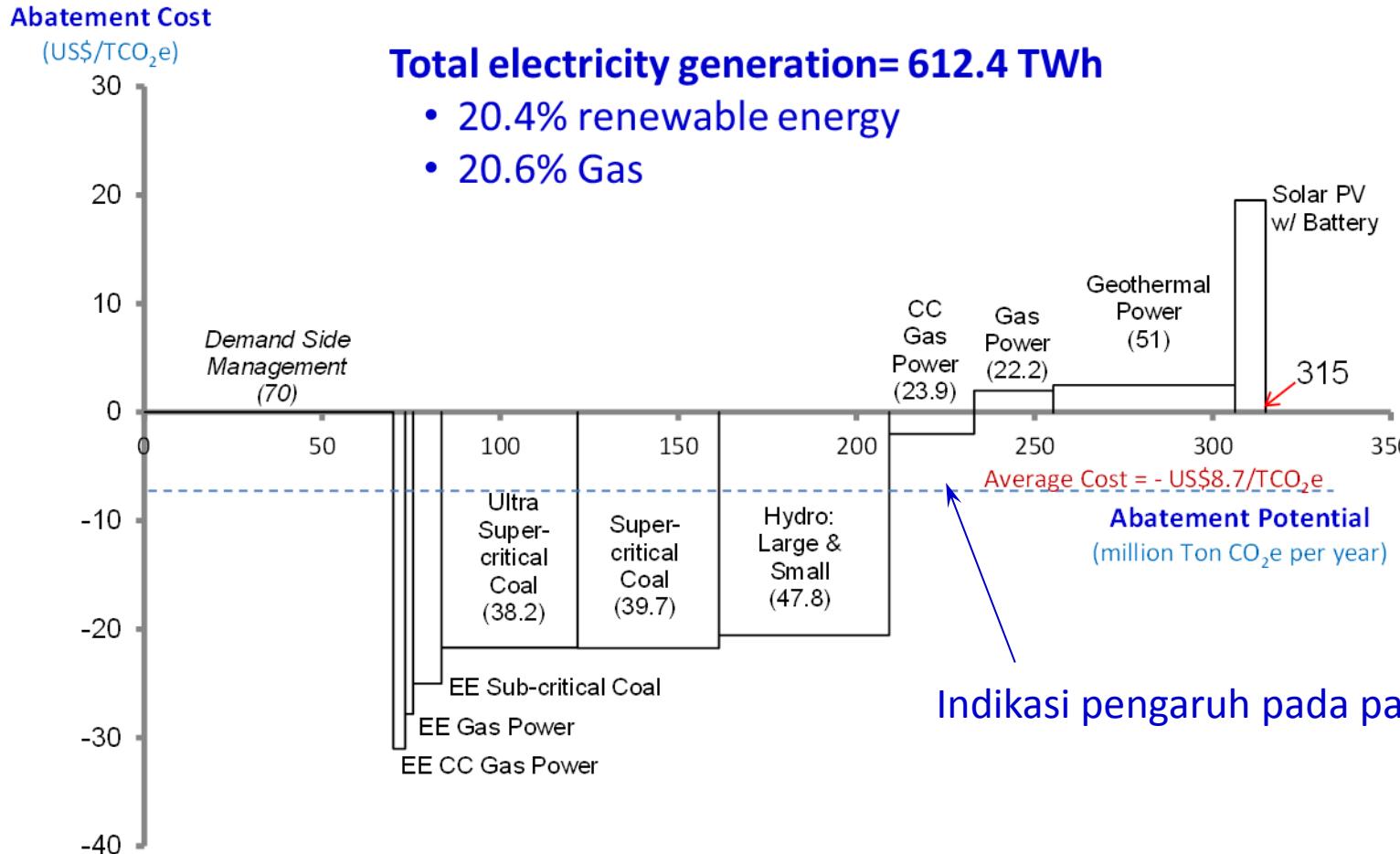
- Total Pembangkitan = 612.4 TWh
- 20.4% RE dan 20.6% Gas
- 70 MtCO₂e Demand Side Management
- Potensi Mitigasi = 315 MtCO₂e

Dengan RUPTL 2018 – 2027 dan NDC:

- Total Pembangkitan = 612.4 TWh
- 24.6% RE dan 24.8% Gas
- 70 MtCO₂e Demand Side Management
- Potensi Mitigasi = 349 MtCO₂e

Catatan: harga rata-rata batubara = USD 70/ton.

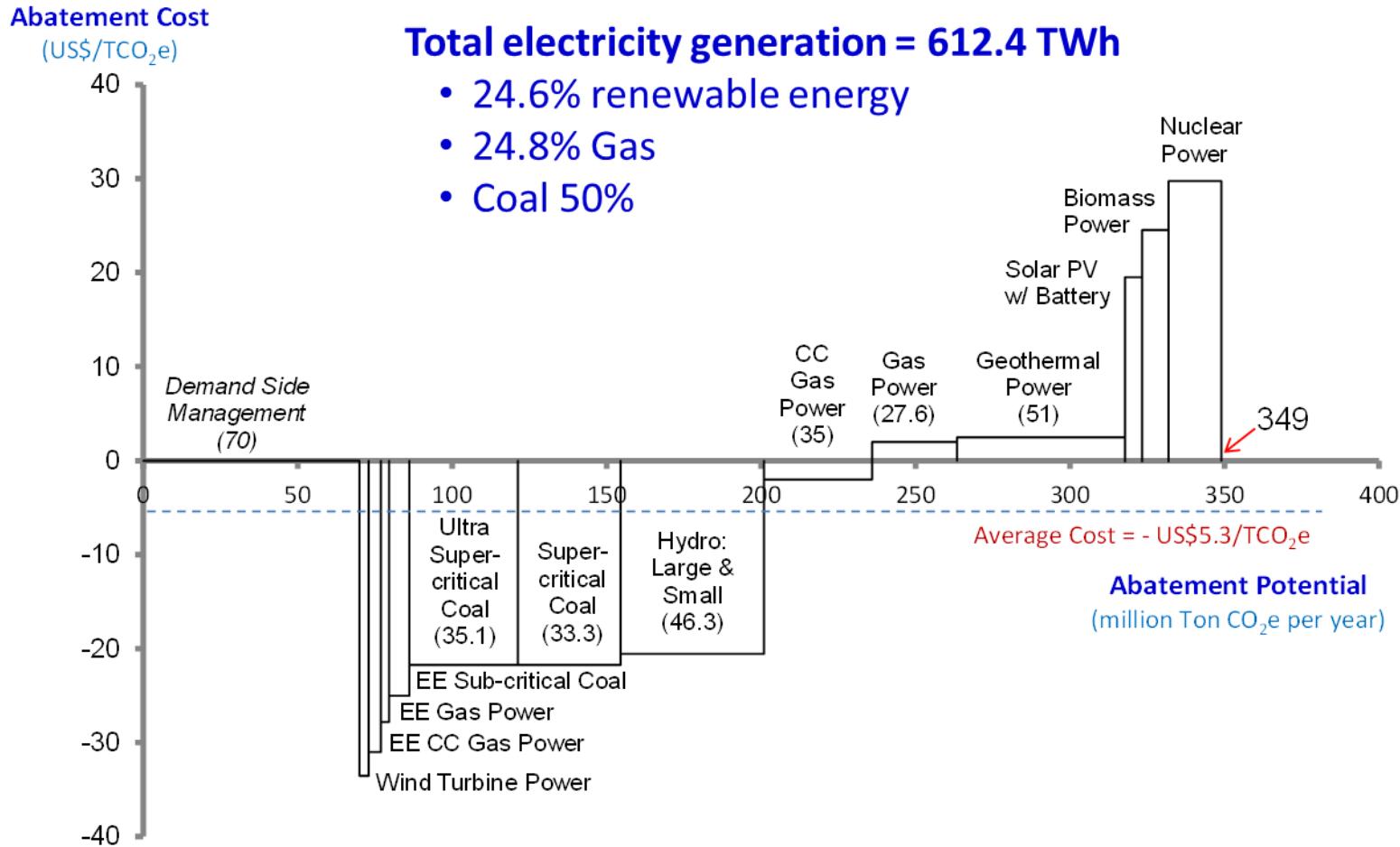
RUPTL 2018 – 2027: PERTUMBUHAN @ 6.86%, DAN 2027 – 2030 PERTUMBUHAN @ 6.86% = 612.4 TWh



RUPTL 2018 – 2027: DENGAN PERTUMBUHAN @ 6.86%, 2027 – 2030: DENGAN PERTUMBUHAN @ 6.86% = 612.4



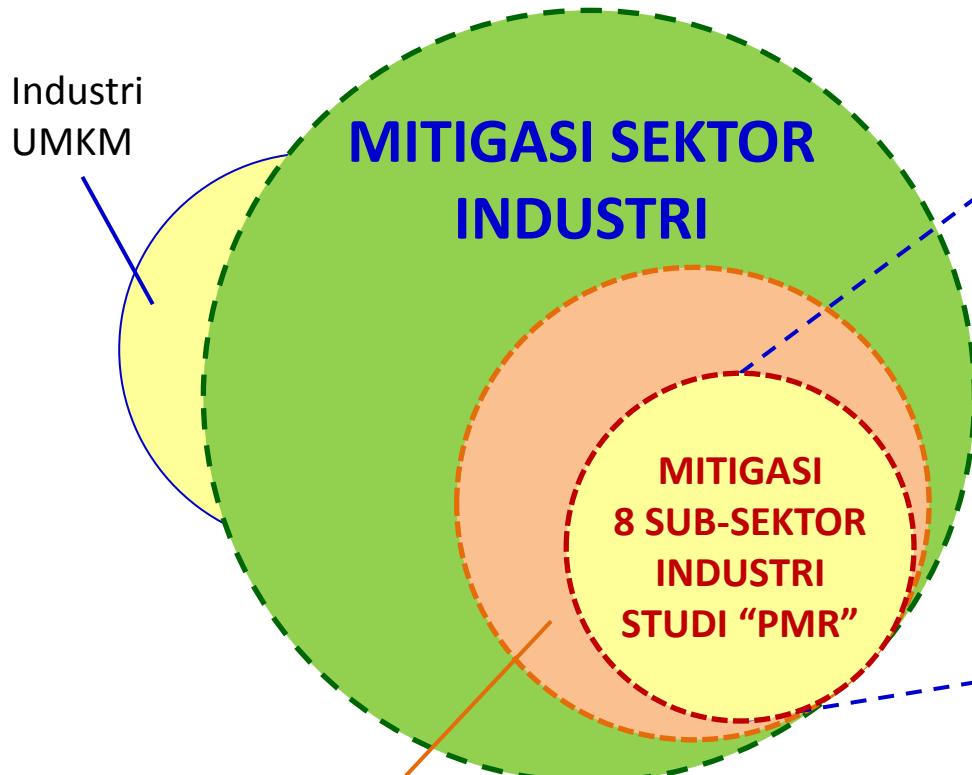
TWh DENGAN TAMBAHAN EBT DAN PLTG-PLTGU



SEMESTA EMISI 8 SUB-SEKTOR INDUSTRI



8 Sub-sector Industri (hasil sementara) diproyeksikan akan mengeluarkan 338.42 MtCO₂e dengan proyeksi mitigasi yang teridentifikasi 43.68 MtCO₂e



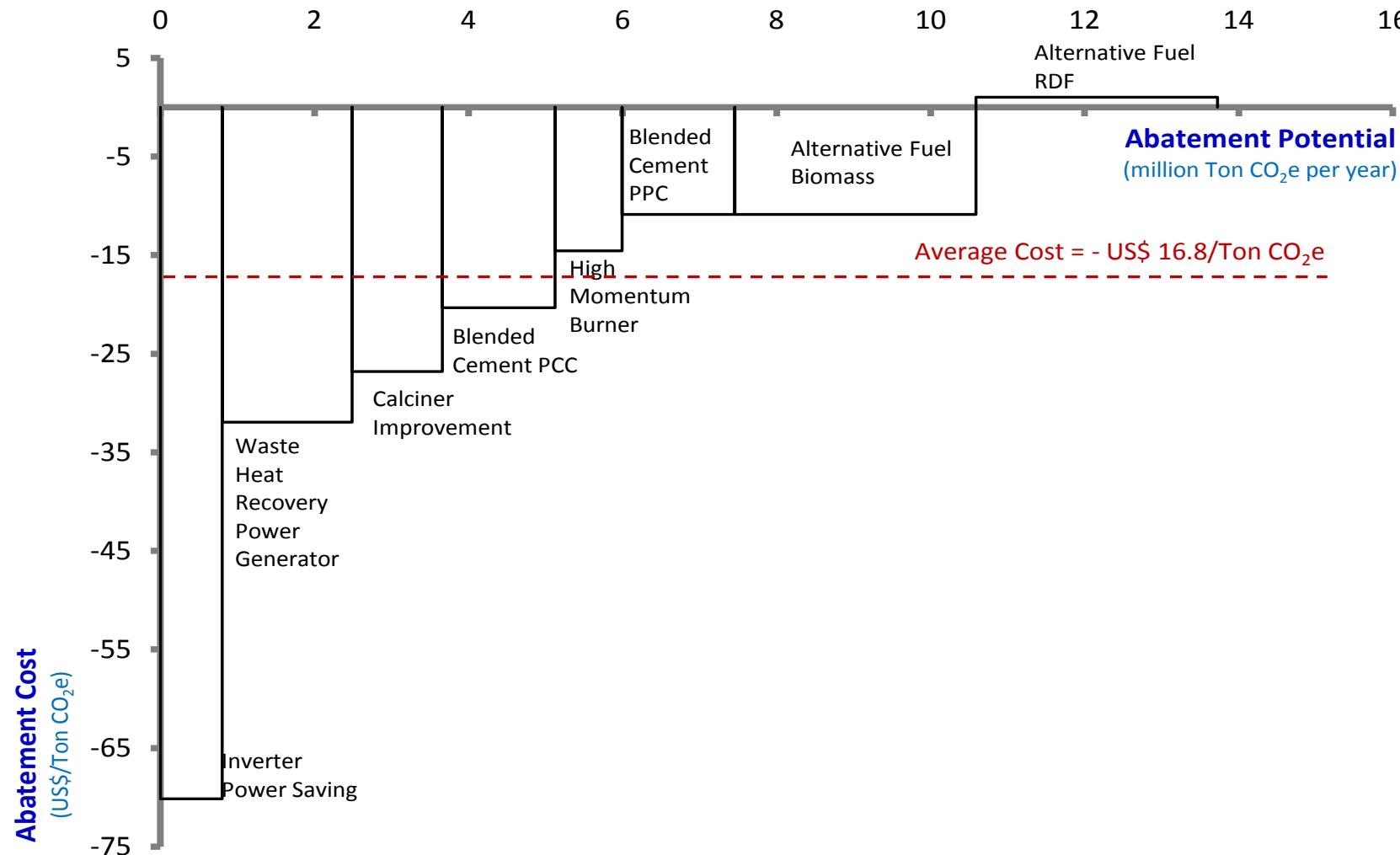
MITIGASI 8 SUB-SEKTOR
INDUSTRI

Satuan: MtCO₂e

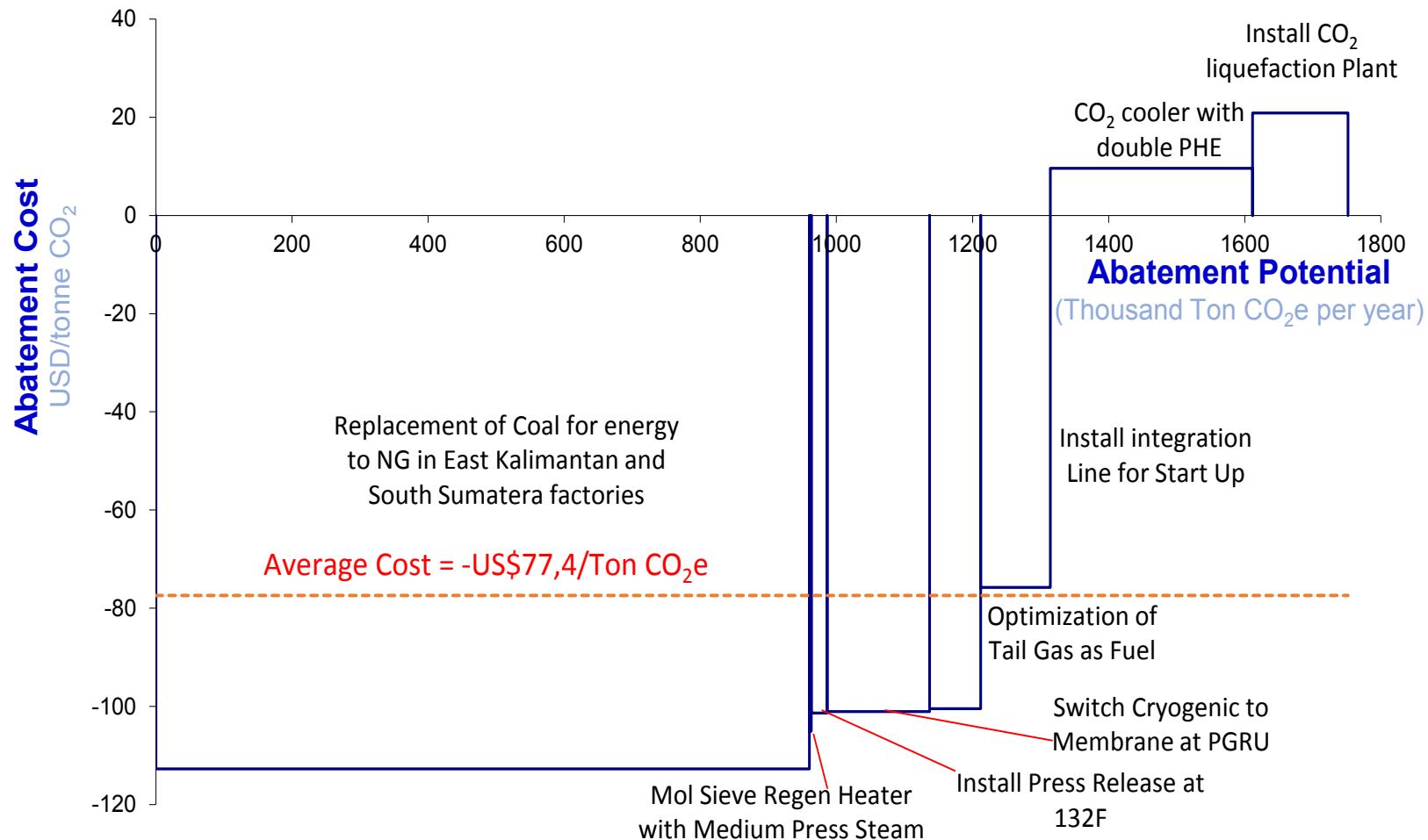
Industri	Energi Langsung	Energi Tidak Langsung	IPPU	Limbah	Sub-Total
Semen	6.27	2.49	4.97	-	13.73
Pupuk	1.04	0.00	0.69	-	1.73
Kimia	0.35	0.44	0.47	-	1.26
Keramik & Gelas	0.64	0.15	-	-	0.79
Besi & Baja	2.04	1.66	3.32	-	7.02
Pulp & Kertas	3.05	0.50	-	1.16	4.70
Makanan & Minuman, Tekstil	13.84	0.61	-	-	14.45 *)
Total	27.23	5.84	9.45	1.16	43.68

*) Hasil sementara

MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI SEMEN



MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI PUPUK

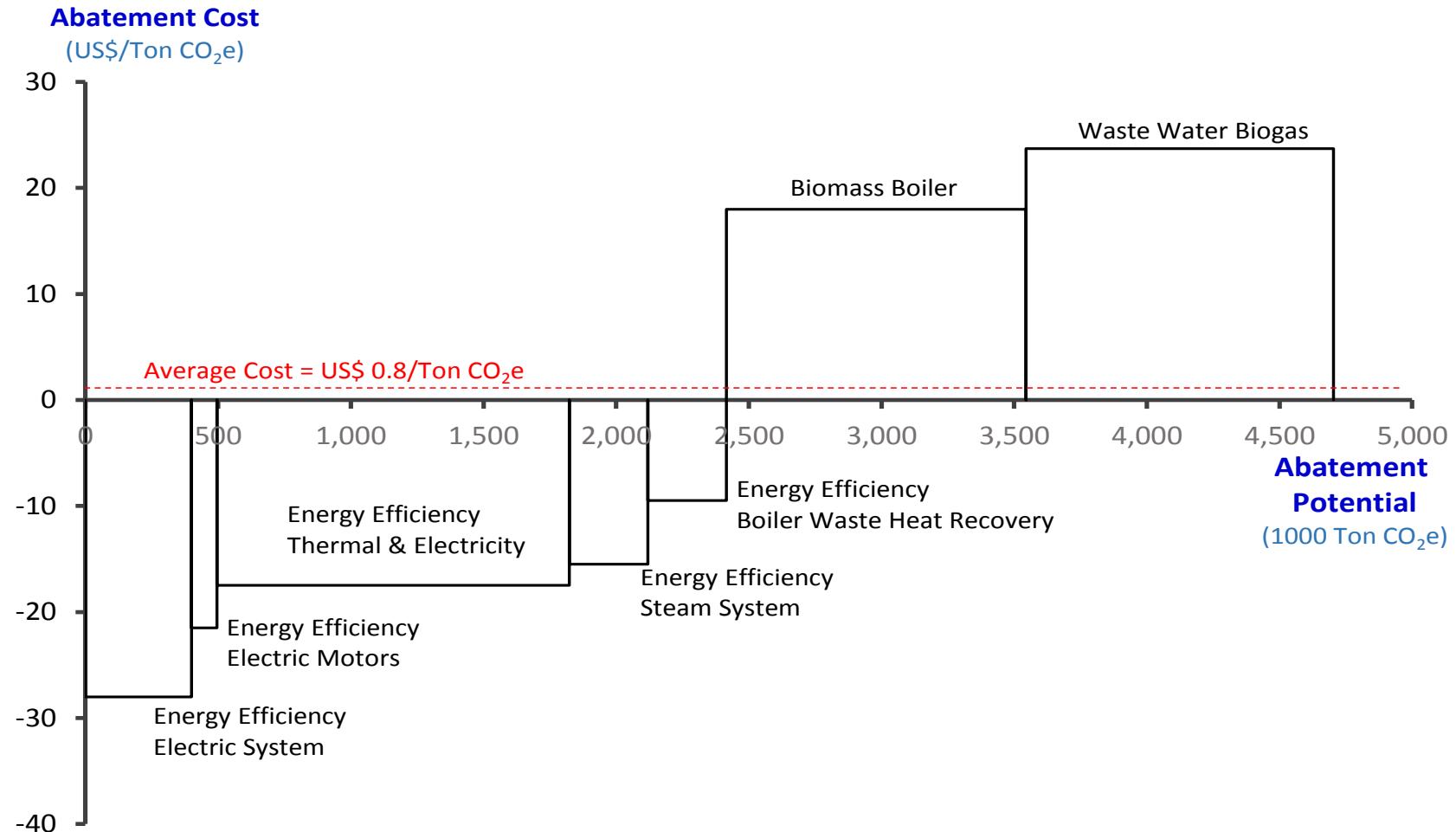


MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI PULP & KERTAS

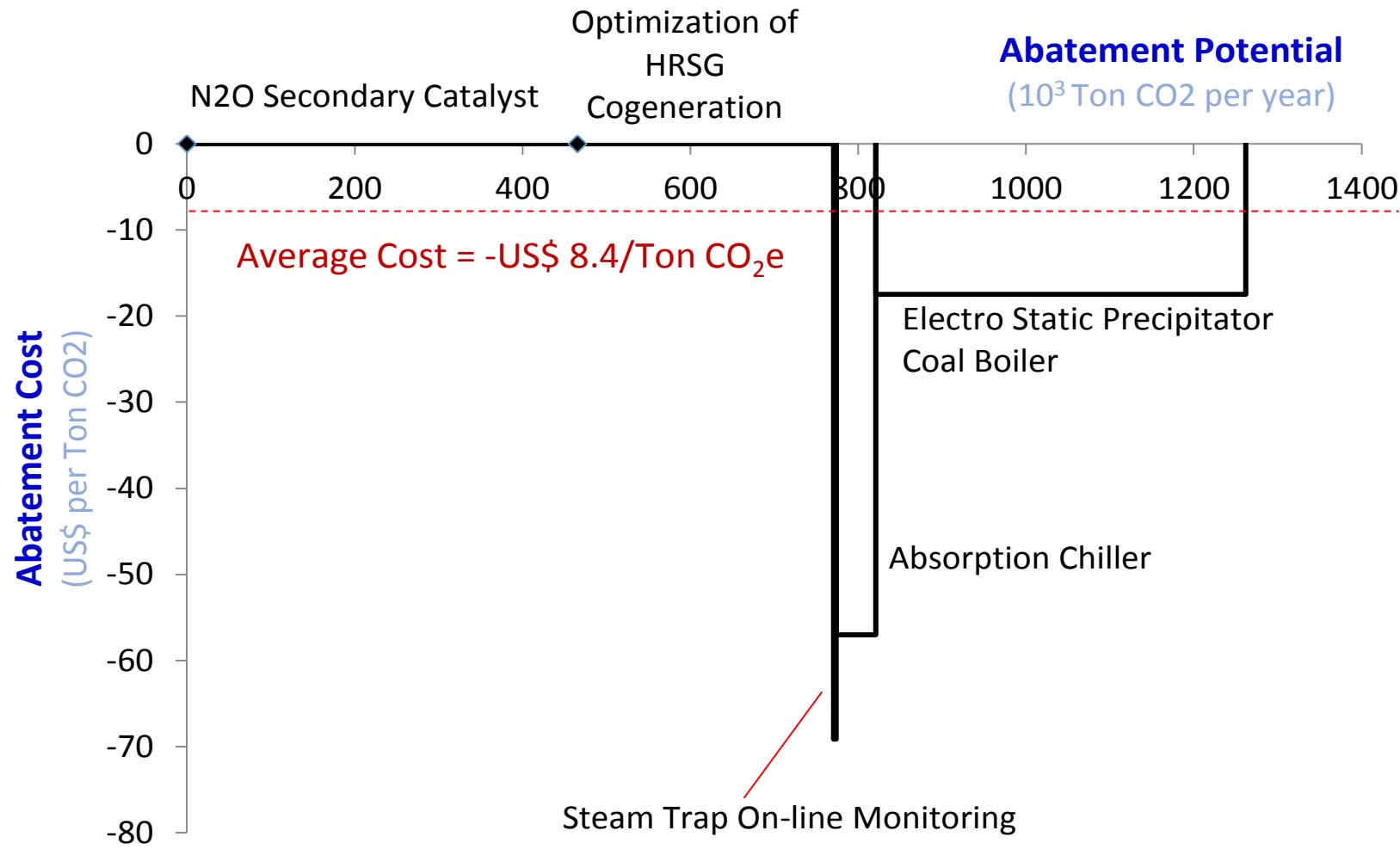


KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

Empowered lives.
Resilient nations.



MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI KIMIA

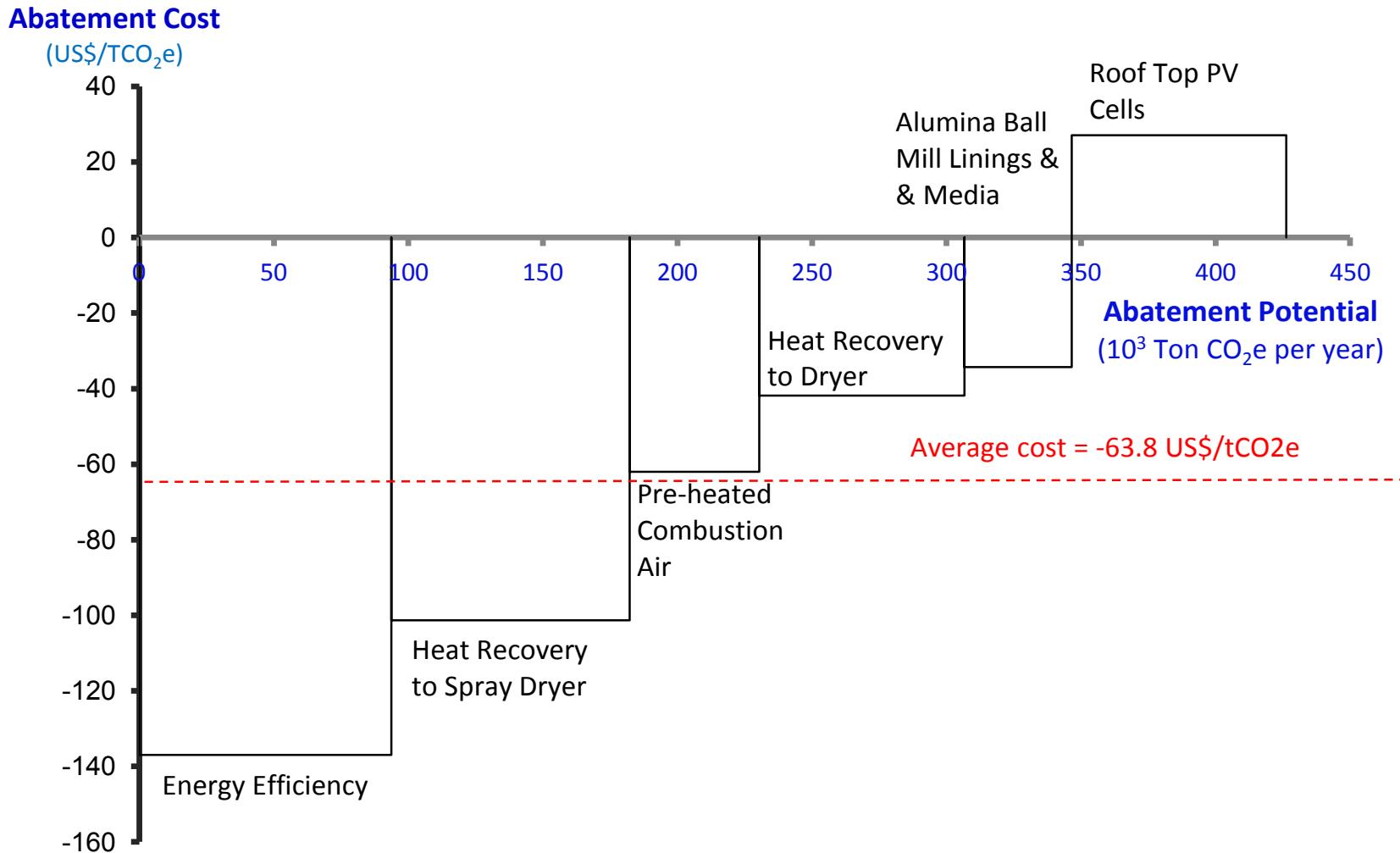


MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI KERAMIK



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

Empowered lives.
Resilient nations.

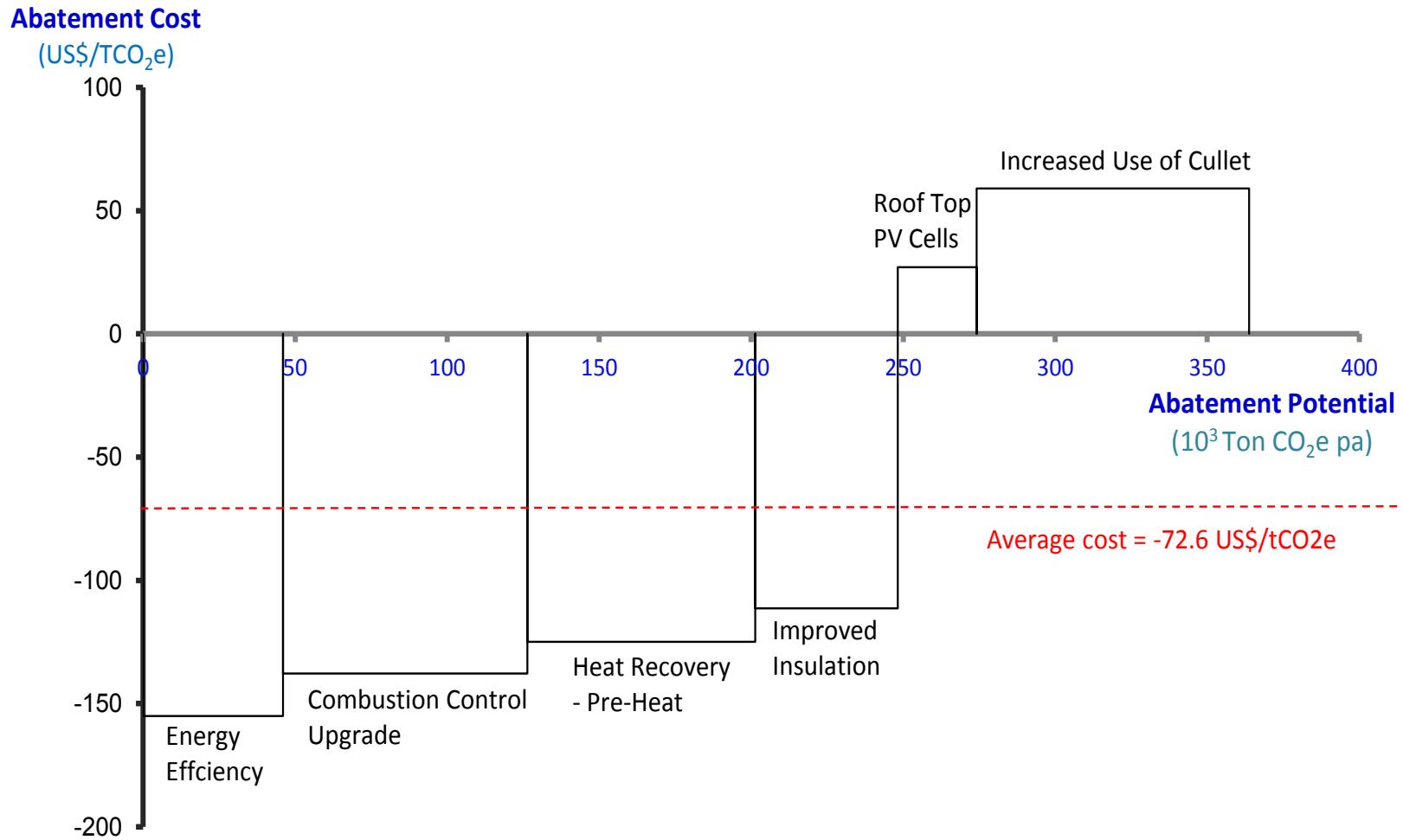


MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI KERAMIK



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

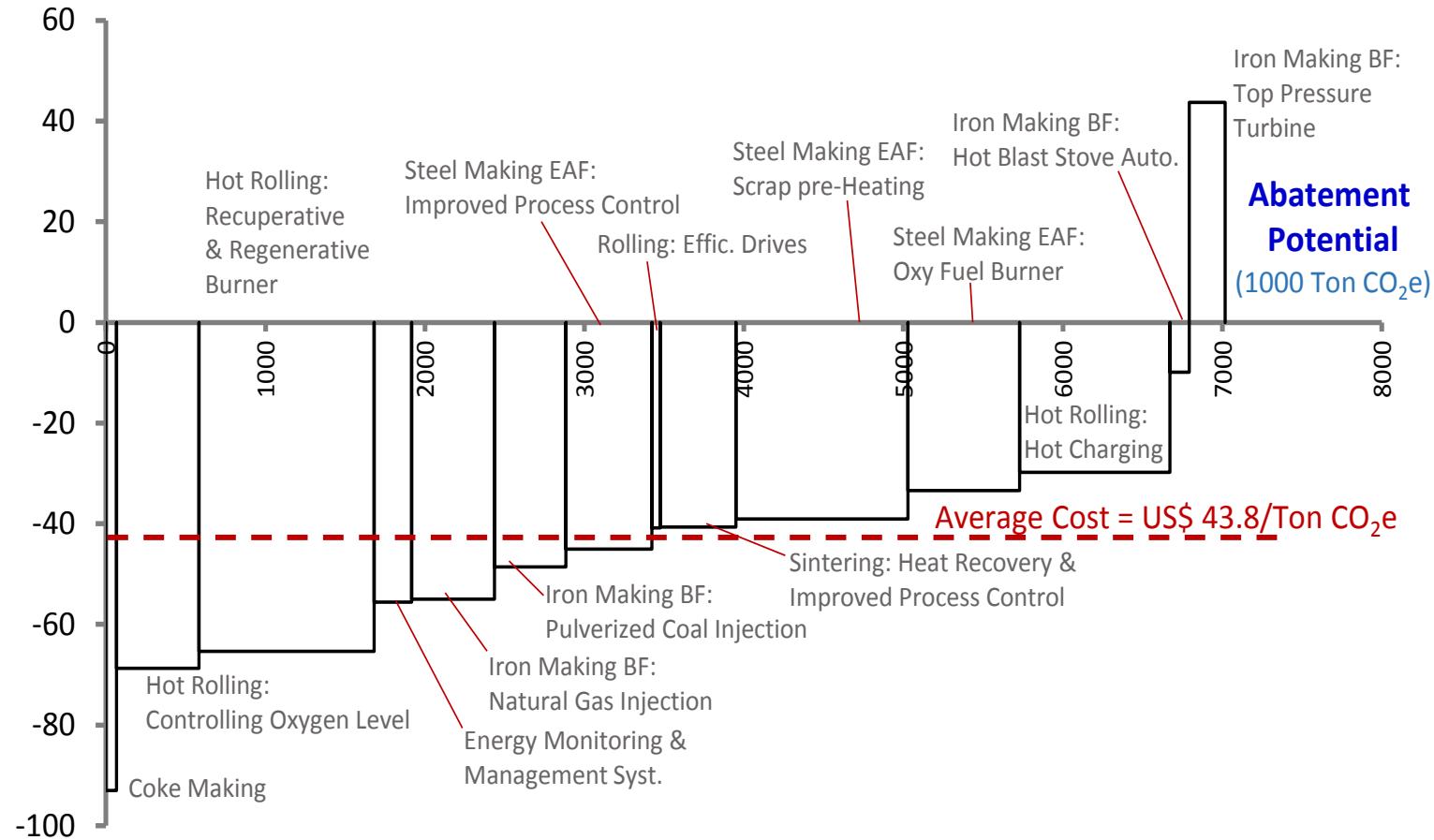
Empowered lives.
Resilient nations.



MACC UNTUK KEGIATAN MITIGASI INDUSTRI BESI & BAJA



Abatement Cost
(US\$/Ton CO₂e)



Hasil sementara

REKOMENDASI DAN PEMBELAJARAN PENTING DARI STUDI MACC



- Indonesia dapat mencapai komitmen CM1 NDC untuk Pembangkit dan 8 sub-sektor Industri mengurangi 29% emisi GRK dengan mengambil “low hanging fruit”
- Namun, Indonesia memerlukan insentif agar para pelaku Pembangkit dan Industri untuk mengambil kesempatan-kesempatan dengan biaya mitigasi negatif
- Selain insentif, Indonesia memerlukan kebijakan yang sinergis/sejalan, misal: pengurangan resiko eksplorasi dan sosial EBT, ketersediaan gas alam untuk industri maupun perpajakan/pendanaan yang mengundang investasi.

TERIMA KASIH

Artissa Panjaitan: apanjaitan@gmail.com

